

ANALISIS KEBIJAKAN PEMKOT SURABAYA DALAM MENANGANI ANAK JALANAN

ANALYSIS POLICY OF PEMKOT SURABAYA FOR OVERCOMING CHILD ROAD

Erna Setijaningrum¹⁾

ABSTRACT

This research aim to see public road child characteristic which in region of Surabaya. Hereinafter, given the the public road child characteristic hence will earn to be applied by policy which is seseuai to overcome the problem of public road child. With background to the number of public road children amounts in town of Surabaya, and problems of public road child concerning many matters especially nation the rising generation hence needing the existence of a serious handling. Responder in this research is officer On duty Social and public road child in Surabaya.

Data obtained done open interview, data of sekunder result of research before all, and field observation. Of research which is known that public road child characteristic in Surabaya that is all this public road children go down to road;street with economic reason, do not forbear staying remain at home, arena dank go with the stream friend. Therefore need a[n special handling to handle the problem of adapted for public road child is characteristic of each public road child.

Keywords: *policy of Pemkot Surabaya, child road*

PENDAHULUAN

Fenomena sosial yang muncul sebagai akibat kondisi perekonomian saat ini salah satunya adalah perkembangan jumlah anak jalanan diberbagai kota besar. Kehadiran anak jalanan yang semakin besar jumlahnya dirasakan semakin mencemaskan, karena disatu sisi dapat menimbulkan dampak negatif bagi penertiban, kebersihan dan keamanan, serta keindahan kota. Di sisi lain apabila jumlah anak jalanan semakin besar maka semakin besar pula jumlah masyarakat yang menjadi tanggungan masyarakat dan pemerintah. Anak jalanan juga merupakan generasi muda yang seharusnya dipersiapkan untuk mengisi pembangunan dan berperan sebagai tulang punggung keberlangsungan bangsa. Bila generasi muda tidak bisa diandalkan dikarenakan mereka hidup sebagai anak jalanan, maka keberlangsungan kehidupan bangsa juga akan terganggu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan 15 Rumah Singgah yang ada di Surabaya hasilnya sangatlah mengejutkan. Prosentase jumlah anak jalanan jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh LIPI dan BPS pada tahun 1999 dapat diketahui bahwa penyebab atau alasan anak jalanan turun ke jalanan adalah sangat bervariasi. Prosentase terbesar dari alasan mereka turun ke jalan (menjadi anak jalanan) adalah untuk membantu orang tua, akibat biaya sekolah kurang dan karena putus sekolah.

Hasil pemetaan dan survey anak jalanan juga menunjukkan bahwa hampir 70% anak jalanan melakukan pekerjaan sebagai pengamen, kemudian pengasong/ pedagang, dan pemulung. Sedangkan kelompok umur yang paling dominan turun ke jalan adalah usia 15 – 18 tahun, kemudian 10 – 14 tahun. Berdasarkan

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

pengamatan yang dilakukan di kota Surabaya, anak jalanan yang berumur dibawah 6 tahun terlihat juga semakin banyak. Kondisi tersebut sebenarnya merupakan keadaan yang sangat memprihatinkan, baik dipandang dari sudut perkembangan jiwa anak-anak tersebut, dari segi perekonomian, dari segi keamanan, serta keindahan dan ketertiban kota.

Di kota Surabaya, berbagai kebijakan pemerintah kota dalam menangani anak jalanan telah dilakukan dengan berbagai cara penanganan, antara lain dengan memasukkannya ke “rumah singgah”, tempat-tempat pelatihan, serta dengan memberi bekal ketrampilan kepada mereka. Upaya penanganan anak jalanan juga dilakukan secara preventif dengan harapan agar jumlah anak jalanan dapat berkurang. Namun dalam kenyataannya jumlah anak jalanan yang melakukan kegiatan di jalan belumlah berkurang, bahkan mereka yang telah ditangani akan kembali lagi ke jalan atau berpindah tempat menjadi anak jalanan di tempat lain.

Walaupun telah ada upaya pemerintah kota Surabaya untuk membuat kebijakan-kebijakan penanganan anak jalanan, namun ternyata masih belum bisa menjangkau anak jalanan secara keseluruhan. Dan bahkan masih banyak anak jalanan yang sudah dilakukan pembinaan masih turun ke jalanan lagi.

Berdasarkan fenomena anak jalanan dan belum efektifnya kebijakan penanganan anak jalanan oleh Pemkot Surabaya tersebut, maka perlu dilakukan kajian untuk menganalisis Kebijakan Pemkot Surabaya dalam menangani anak jalanan. Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat diketahui karakteristik anak jalanan yang ada di Kota Surabaya. Dengan mengetahui karakteristik anak jalanan diharapkan kebijakan penanganan anak jalanan akan tepat sasaran, dengan demikian jumlah anak jalanan yang ada di Kota Surabaya akan semakin berkurang dan kesulitan yang dialami anak jalanan akan dapat teratasi.

Dari masalah anak jalanan yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah karakteristik anak jalanan yang ada di Kota Surabaya, 2) Dengan mengetahui karakteristik anak jalanan yang ada, maka alternatif-alternatif Kebijakan Pemkot apakah yang tepat dan sesuai dalam menangani anak jalanan tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti akan menggambarkan karakteristik anak jalanan yang ada di kota Surabaya, selanjutnya peneliti akan mencari alternative kebijakan yang sesuai dalam menangani anak jalanan dan sesuai dengan karakteristik anak jalanan tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah para pembuat dan pelaksana kebijakan dari Pemkot Surabaya dan anak jalanan. Sampel akan ditarik secara *The Systematic Selection Procedur*. Teknik ini digunakan dengan nalar bahwa kita sudah mengetahui secara jelas kriteria sampel yaitu para pembuat dan pelaksana kebijakan dan anak jalanan. Data akan dikumpulkan dengan cara mewawancarai para pegawai Dinas Sosial dan para anak jalanan di kota Surabaya. Selain itu juga digunakan data sekunder yang mendukung, serta dilakukan observasi lapangan. Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu semua hasil wawancara, data sekunder, serta hasil pengamatan di lapangan akan ditarik kesimpulan dengan cara menjelaskan menjadi suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para responden yang sudah ditentukan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, artinya responden tidak diberi suatu daftar pertanyaan yang sudah diberi jawaban tertentu untuk dipilih, namun responden diminta untuk bercerita tentang masalah yang diajukan peneliti

dengan panjang lebar. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Sosial kota Surabaya sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani anak jalanan yang ada di wilayah Surabaya.

Wawancara dengan pegawai Dinas Sosial ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan gambaran yang mendalam tentang berbagai kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam rangka penanganan masalah anak jalanan yang ada. Dinas Sosial sebagai pelaksana / implementor kebijakan akan bisa digunakan acuan bagi peneliti untuk melakukan analisis terhadap kebijakan yang ada dalam rangka penanganan anak jalanan. Selanjutnya, untuk memperoleh tambahan informasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa anak jalanan yang ada di kota Surabaya. Selanjutnya juga dilakukan observasi langsung di lapangan, dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat lokasi, kondisi, dan menemui anak jalanan. Hasil observasi ini akan berguna sebagai data tambahan (untuk cross check) dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Selain itu data sekunder juga digunakan sebagai acuan untuk melakukan kajian dalam penelitian ini.

Dalam mengatasi masalah anak jalanan, Dinas Sosial melakukan tiga kebijakan yaitu: 1) Preventif, 2) Represif, 3) Pemberdayaan.

Tindakan preventif dilakukan dengan cara menghimbau kepada masyarakat, terutama pengendara kendaraan yang sering lewat di perempatan jalan/*traffic light* yang biasanya digunakan sebagai tempat mangkal para anak jalanan. Para pengendara ini dihimbau agar jangan sekali-kali memberikan sesuatu/uang kepada para anak jalanan yang sering menghampiri mereka pada saat lampu *traffic light* berwarna merah. Dengan tidak memberikan sesuatu/uang kepada mereka diharapkan para anak jalanan ini tidak akan melakukan kegiatan lagi di setiap

perempatan. Hal ini perlu adanya kerjasama yang baik dari warga masyarakat agar mau mengikuti himbauan seperti ini. Berkembangnya jumlah anak jalanan di Surabaya selain dipengaruhi oleh perkembangan kota (dengan banyaknya *traffic light* di perempatan jalan utama), juga karena kebiasaan masyarakat kita yang selalu memberikan sejumlah uang kepada anak jalanan.

Tindakan represif dilakukan dengan jalan "Operasi Simpatik", yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Polwiltabes, dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP). Kegiatan operasi terhadap anak jalanan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan operasi terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng). Namun pada pelaksanaan di lapangan, bila ada anak jalanan yang lari akan dibiarkan saja, artinya mereka tidak dipaksa untuk ikut dengan petugas lapangan agar mau dibawa untuk dibina. Hal ini lebih dikarenakan anak jalanan adalah mereka yang masih tergolong usia anak/remaja, sehingga tidak boleh dilakukan pemaksaan. Diakui oleh bapak Gatot, yang sering memandu kegiatan "Operasi Simpatik", memang sangat sulit mengajak anak jalanan untuk mau ikut bergabung dengan petugas agar mendapatkan pembinaan. Hidup di jalanan merupakan suatu kebebasan bagi para anak jalanan karena mereka bisa hidup bebas tanpa ada peraturan yang mengekang kebebasan mereka.

Dalam penerapan kebijakan terhadap anak jalanan, yang diberi nama "Operasi Simpatik", ada beberapa tahap yang dilaksanakan yaitu: 1) Penertiban, 2) Seleksi, 3) Stimulus, 4) Pembinaan, dan 5) Rehabilitasi Sosial.

Penertiban dilaksanakan setiap bulan yang pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi terkait yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Polwiltabes, dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP). Penertiban anak jalanan ini dilakukan bersamaan

dengan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) dengan alasan untuk efisiensi waktu. Setelah para anak jalanan tersebut terjaring, maka akan dilakukan seleksi apakah mereka berasal dari luar Surabaya ataukah mereka berasal dari Surabaya. Kemudian akan diseleksi lagi secara kondisi fisik mereka, yaitu bila sakit secara fisik akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Surabaya, sedangkan yang mengalami psikotik/gangguan kejiwaan akan diserahkan kepada Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Sedangkan yang potensial akan dilakukan pembinaan di lingkungan pondok sosial yang berlokasi di Keputih Sukolilo Surabaya. Lokasi pembinaan di Keputih Sukolilo ini sebenarnya adalah tempat pembinaan bagi para gelandangan dan pengemis (gepeng), namun karena pembinaan untuk anak jalanan tidak memiliki tempat khusus sehingga dijadikan satu.

Sebelum dilakukan pembinaan, para anak jalanan ini akan diberi stimulus dengan memberikan mereka sejumlah uang bila mereka mau mengikuti pembinaan. Untuk kegiatan pembinaan ini, Dinas Sosial akan bekerjasama dengan lembaga pembinaan yang ada, misalnya kursus montir, mengemudi, menjahit, memasak, dan lainnya. Hal ini terpaksa dilakukan karena Dinas Sosial tidak memiliki tenaga ahli dibidang tersebut. Selain itu fasilitas berupa tempat pelatihan yang masih sangat minim karena hanya berupa gedung saja namun tidak ada fasilitas berupa peralatan/alat peraga untuk melakukan kegiatan pembinaan. Selanjutnya, dilakukan rehabilitasi sosial, dimana para anak jalanan ini akan dikembalikan kepada keluarganya lagi, dan diharapkan dengan keterampilan yang sudah mereka miliki akan bisa menjadi bekal bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang normal seperti para anak /remaja lainnya seusia mereka.

Selanjutnya, tindakan pemberdayaan terhadap anak jalanan dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan rumah singgah-rumah singgah yang ada di Surabaya. Anak jalanan tersebut dititipkan

ke rumah singgah untuk dilakukan pembinaan. Sebenarnya panti asuhan juga merupakan alternatif tempat pembinaan bagi anak jalanan. Namun kebanyakan dari anak jalanan tidak akan merasa betah tinggal di panti asuhan yang memiliki peraturan dan disiplin yang ketat. Karena anak jalanan terbiasa dengan kehidupan jalanan yang bebas tanpa peraturan formal, maka mereka akan lebih cocok bila ditempatkan pada rumah singgah sebagai tempat penampungan. Rumah singgah yang ada di wilayah Surabaya sejumlah 15, yang masing-masing rata-rata membina sekitar 100 anak jalanan. Kerjasama dengan rumah singgah ini dilakukan dengan beberapa alasan: 1) Dinas Sosial tidak memiliki tenaga ahli untuk melakukan pembinaan, 2) Dinas Sosial tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan pembinaan, 3) Mengingat keadaan psikologis anak jalanan, yaitu bila mereka diberi pembinaan secara formal akan mengalami kesulitan. Anak jalanan yang terbiasa hidup bebas di jalanan akan merasa nyaman bila mereka berada di rumah singgah, dan 4) Rumah singgah memiliki pendanaan khusus yang digunakan untuk melakukan pembinaan, baik berasal dari pemerintah kota maupun dana dari *funding* luar negeri yang memiliki perhatian pada nasib anak jalanan.

Untuk melengkapi data, maka peneliti juga melakukan wawancara terhadap anak jalanan yang ada di wilayah Surabaya. Dari beberapa anak jalanan yang diwawancarai, didapat data bahwa sebagian besar dari anak jalanan tersebut turun ke jalan adalah karena alasan ekonomi. Mereka mengaku bahwa orang tuanya sudah tak sanggup lagi membiayai sekolah, sehingga terpaksa mereka mencari uang sendiri untuk membayar sekolah. Ada pula yang memang menjadi anak jalanan untuk menghidupi diri sendiri karena sudah tidak punya keluarga lagi.

Selain karena alasan tersebut diatas, ternyata ada juga anak jalanan yang turun ke jalan karena mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka menjadi anak jalanan bukan

karena himpitan ekonomi, tapi lebih kepada sekedar kumpul dengan kawan-kawannya. Menurut pengakuan beberapa anak jalanan, ada pula yang karena mereka merasa tidak betah di rumah sehingga lebih baik turun ke jalan bersenang-senang dengan kawan-kawannya. Profesi yang mereka jalankan bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pengamen. Usia mereka juga relatif lebih dewasa daripada para anak jalanan yang berprofesi sebagai pengemis. Lebih ironisnya lagi, banyak pula anak jalanan yang uangnya digunakan untuk sekedar mabuk-mabukan dan berjudi.

Sebenarnya anak jalanan tersebut juga ingin hidup normal seperti orang lainnya. Mereka juga punya keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Ketika ditanyakan kepada beberapa anak jalanan, keterampilan apakah yang mereka ingin pelajari, kebanyakan dari mereka ingin mempelajari montir dan menjadi sopir. Ada juga yang ingin mempelajari pertukangan, sehingga mereka bisa membuat peralatan rumah tangga dari bahan kayu seperti kursi, tempat tidur, meja, dan lain-lain. Hal ini mungkin juga karena mereka sangat minim dalam pendidikan formal, sehingga keinginan mereka adalah sebagai montir dengan harapan bisa bekerja di bengkel atau bisa menjadi sopir dan tukang kayu.

Para anak jalanan yang ingin menguasai keterampilan yang menarik adalah anak jalanan yang turun ke jalan karena himpitan masalah ekonomi. Sedangkan bagi anak jalanan yang turun ke jalan karena hanya ingin hura-hura dengan kelompoknya tidak menginginkan pembinaan atau keahlian.

Dari data yang telah disajikan tersebut, maka karakteristik anak jalanan yang ada di wilayah Surabaya adalah sebagai berikut: 1) Alasan sebagian besar anak jalanan turun ke jalan adalah karena masalah ekonomi. Mereka turun ke jalan untuk mencari uang, membantu orang tua dan untuk biaya sekolah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus menghidupi diri sendiri karena tidak memiliki keluarga,

sehingga mau tak mau harus turun ke jalan untuk mencari uang; 2) Karena masalah keluarga. *Broken home* dan keluarga yang tidak harmonis juga merupakan alasan mengapa anak turun ke jalan dan memilih jalan hidup sebagai anak jalanan yang dirasakan oleh mereka bisa hidup bebas; 3) Ada juga yang mereka turun ke jalan karena ikut-ikutan teman. Sekedar bersenang-senang dan kumpul-kumpul bersama teman. Kegiatan mereka adalah mabuk-mabukan, berjudi, dan akhirnya menyeret mereka ke tindakan kriminal dengan melakukan pencurian, perampokan, pencopetan, dan lain-lain.

Anak jalanan yang turun ke jalan dengan alasan himpitan ekonomi, mereka masih ingin belajar dan mau mengikuti pembinaan. Keterampilan yang ingin mereka kuasai adalah menjadi montir, sopir, dan pertukangan. Sedangkan para anak jalanan yang turun ke jalan karena alasan tidak betah tinggal di rumah dan karena alasan ikut-ikutan teman, mereka tidak lagi tertarik mengikuti pembinaan.

Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Surabaya dalam upaya penanganan anak jalanan bisa dianalisis sebagai berikut: 1) Dinas Sosial masih belum melakukan tindakan yang optimal dalam penanganan terhadap masalah anak jalanan, 2) Dengan tidak adanya program langsung / tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak jalanan. Selama ini, anak jalanan yang berhasil terjaring dalam “ Operasi Simpatik” dititipkan pada rumah singgah - rumah singgah yang ada di wilayah Surabaya. Selanjutnya, rumah singgah inilah yang kemudian memberikan pembinaan terhadap anak jalanan, 3) Tidak adanya tenaga ahli / professional dari Dinas Sosial yang bisa melakukan pembinaan baik mental/ spiritual dan berupa keahlian yang bisa digunakan bekal oleh anak jalanan pada saat diterjunkan lagi ke masyarakat, dan 4) Masih belum adanya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tidak memungkinkan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan. Sarana fisik

yang ada hanya berupa gedung/aula yang hanya bisa digunakan untuk tempat ceramah saja. Tidak adanya fasilitas lain berupa peralatan untuk melakukan pembinaan sangat tidak mungkin dilakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan.

Dari berbagai data tersebut diatas, maka bila akan melakukan penanganan terhadap anak jalanan harus dibuatkan suatu kebijakan khusus. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat ada perbedaan karakteristik anak jalanan sehingga masing-masing karakteristik memerlukan suatu penanganan yang khusus. Oleh karena itu, perlu adanya suatu agenda kebijakan yang bisa digunakan sebagai alternatif kebijakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dinas Sosial belum optimal dalam menangani masalah anak jalanan. Hal ini disebabkan: (1) Belum adanya program khusus yang digunakan untuk mengatasi masalah anak jalanan; (2) Penanganan terhadap anak jalanan tidak disesuaikan dengan karakteristik anak jalanan sehingga program yang ada tidak tepat sasaran; (3) Masih kurangnya fasilitas yang tersedia, menyebabkan tidak berjalannya program sesuai tujuan. Dinas Sosial tidak memiliki tenaga ahli dan fasilitas tempat pembinaan; (4) Dinas Sosial tidak menangani secara langsung pembinaan anak jalanan, namun diserahkan ke rumah singgah. Hal ini menyebabkan ketidakseriusan Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan; dan (5) Tidak ada *follow up* atau pemantauan terhadap anak jalanan yang sudah dibina, sehingga anak jalanan lebih suka turun atau kembali lagi ke jalan daripada kembali ke keluarganya.

Karakteristik anak jalanan yang ada di wilayah Surabaya adalah: (1) Menjadi anak jalanan karena masalah ekonomi. Mereka terpaksa menjadi anak jalanan karena kemiskinan yang mereka alami sehingga memaksa mereka bertarung melawan hidup dengan mencari uang di jalanan. Uang yang mereka peroleh digunakan

untuk membantu orang tua, biaya sekolah, bahkan untuk menghidupi diri sendiri; (2) Menjadi anak jalanan karena alasan tidak betah tinggal di rumah. Hal ini menyebabkan mereka turun ke jalan dan mencari kesenangan atau kebebasan yang mereka inginkan; (3) Menjadi anak jalanan karena pengaruh dari teman. Karena mereka memiliki teman yang berprofesi sebagai anak jalanan, sehingga mereka ikut-ikutan menjadi anak jalanan.

Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang bisa disampaikan oleh peneliti adalah berupa suatu agenda kebijakan yang bisa digunakan menjadi alternatif kebijakan sebagai berikut.

Pertama, perlu penanganan yang serius untuk mengatasi masalah anak jalanan. Hal ini harus dibentuk suatu program khusus untuk pemberdayaan anak jalanan. Dinas Sosial sebagai elemen pemerintah harus menangani secara langsung masalah anak jalanan dengan melakukan kerjasama terhadap pihak-pihak yang terkait misalnya lembaga pendidikan, pesantren, biro konsultasi psikologi, sekolah, dan rumah singgah yang ada di Surabaya;

Kedua, program khusus untuk menangani masalah anak jalanan tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik anak jalanan yang ada. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan terhadap anak jalanan sesuai karakteristiknya. Kemudian dilakukan pendekatan khusus kepada para anak jalanan agar mereka mau diberi pembinaan;

Ketiga, Memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan anak jalanan. Bagi yang turun ke jalan karena himpitan ekonomi keluarga, perlu diberikan bekal keterampilan yang benar-benar bisa digunakan untuk berwiraswasta. Sedangkan bagi yang turun ke jalan karena masalah keluarga dan ikut-ikutan teman, dilakukan pendekatan secara mental spiritual agar bisa menjadi pribadi yang kuat;

Keempat, bagi anak jalanan yang masih termasuk usia sekolah harus dikembalikan

ke sekolah dengan pembebasan biaya sekolah. Namun mereka juga tetap diberi pembinaan agar memiliki keahlian untuk berwiraswasta;

Kelima, perlu peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kebijakan penanganan masalah anak jalanan;

Keenam, perlu diberikan modal kerja awal, dan dilakukan pendampingan agar usaha yang dirintis bisa berhasil;

Ketujuh, perlu dilakukan kerjasama dengan industri padat karya agar bisa menampung anak jalanan yang sudah terampil; dan (8) Harus ada pengawasan atau ada *follow up* dari pembekalan yang diberikan. Dilakukan pemantauan apakah anak jalanan tersebut sudah bisa hidup mandiri dan memastikan apakah mereka turun ke jalanan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardanto, dkk. 1994. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar, Jakarta, Surabaya, Medan*, Seri Penelitian Pusat Unika Atmajaya, No 002, Kerjasama dengan UNICEF
- Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak. 2002. *Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial RI, Acuan Teknis, Pengembangan Pelayanan Sosial Rumah Singgah Dalam Penanganan Anak Jalanan*, Jakarta
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi II, Cetakan II, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kantor Wilayah Departemen Sosial Surabaya. 1999. *Informasi Program Pendampingan Anak Jalanan di Surabaya*
- Samudra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.